

## ABSTRAK

**Manisa Asahna Wati**, Implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio Bagi Jemaah Haji Reguler Di Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025

Latar belakang penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan perekaman data biometrik wajib oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Aplikasi Saudi Visa Bio bagi seluruh calon jemaah haji. Implementasi kebijakan ini di lapangan menemui berbagai kendala, di antaranya ketidakstabilan jaringan internet, gangguan pada aplikasi, kesulitan pemindaian sidik jari jemaah lansia, serta hambatan alur birokrasi bagi jemaah dengan nama satu suku kata di paspor. Di sisi lain, penjadwalan yang teratur dan jumlah petugas yang memadai menjadi faktor pendukung dalam proses pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan Saudi Visa Bio kepada jemaah haji reguler; (2) ketersediaan dan kesiapan sumber daya pendukung implementasi; (3) disposisi aparatur pelaksana dalam memberikan pelayanan; dan (4) struktur birokrasi dalam pelaksanaan layanan Saudi Visa Bio di Kementerian Agama Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan kualitatif, serta metode kualitatif deskriptif untuk membedah secara mendalam realitas dan fenomena implementasi kebijakan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III (1980) yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio di Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Pertama, variabel komunikasi telah terlaksana secara efektif melalui mekanisme berlapis yang melibatkan KBIHU sebagai mitra strategis, dengan penyampaian informasi yang memenuhi dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kedua, sumber daya yang tersedia dinilai cukup memadai, dengan enam petugas terlatih, fasilitas ruangan yang nyaman, dan jaringan internet yang umumnya stabil; kendala terdapat keterbatasan pada jumlah perangkat resmi yang mendorong petugas menggunakan perangkat pribadi sebagai solusi adaptif. Ketiga, disposisi aparatur pelaksana sangat positif, ditandai dengan komitmen tinggi berbasis nilai pengabdian serta kemampuan mencari solusi kreatif saat menghadapi kendala teknis maupun non-teknis. Keempat, struktur birokrasi telah berjalan baik melalui delapan tahapan teknis yang diterapkan secara konsisten, koordinasi dengan KBIHU, Kanwil dan Kantor Imigrasi berjalan dengan baik, meskipun dokumen SOP tertulis secara formal belum tersedia di tingkat kantor.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Saudi Visa Bio, Jemaah Haji Reguler, Kementerian Agama, Biometrik.